



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS HUKUM PENGADAAN BARANG DAN JASA
SECARA ELEKTRONIK (*ELECTRONIC PROCUREMENT*) PADA INSTANSI
PEMERINTAH**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu
Hukum pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia**

TESIS

NAMA : TEGUH ARIFIYADI

NPM : 0706176252

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI
JAKARTA
JULI 2010**

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
 Nama : TEGUH ARIFIYADI
 NPM : 0706176252
 Program Studi : MAGISTER HUKUM EKONOMI
 Judul Tesis : **ANALISIS HUKUM PENGADAAN BARANG
 DAN JASA SECARA ELEKTRONIK
 (*ELECTRONIC PROCUREMENT*)
 PADA INSTANSI PEMERINTAH**

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian dari persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum, Pada Program Studi Hukum Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Edmon Makarim, S.Kom, S.H, L.LM ()
 Penguji : Abdul Salam, S.H., M.H. ()
 Penguji : Brian Amy Prastyo. S.H., M.L.I. ()

Ditetapkan di : Jakarta
 Tanggal : Juli 2010

KATA PENGANTAR

Syukur tiada terkira senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ilmiah ini.

Ada suatu rasa kebanggaan tersendiri bagi penulis karena telah menyelesaikan karya ini. Hal itu tak lain karena ditengah kesibukkan bekerja dan beraktifitas lainnya, penulis bisa meluangkan waktu untuk menghasilkan karya ini. Sebuah syukur yang luar biasa bagi penulis karena sebelumnya penulis merasa tidak yakin dapat menyelesaikan karya ini dikarenakan terbatasnya referensi, informasi maupun bahan tentang apa yang penulis kaji.

Pengadaan secara elektronik (*e-procurement*) pemerintah merupakan langkah baru bagi pemerintah dan sangat menarik untuk dipahami baik secara yuridis maupun secara teknis. Tidak banyak pejabat publik, kalangan akademis, maupun masyarakat yang memahami secara teoritis maupun praktis atas aspek hukum bidang tersebut. Dengan sedikit pengalaman penulis dalam sektor pengadaan dan audit, akhirnya mendorong penulis untuk lebih mendalami dan menganalisis permasalahan tersebut.

Banyak cobaan, hambatan dan rintangan selama proses penulisan karya ini, namun dengan izin-Nya lah penulis mampu melewati itu semua. Tak lupa ucapan terima kasih penulis kepada banyak pihak yang telah membantu, khususnya keluargaku--istriku tercinta **RR Larasati** dan puteriku tersayang **Ghefira Mahadewi AEA**—tanpa kalian tesis ini tidak berarti apa-apa—Orang tua dan saudara-saudaraku, Keluarga Mertuaku--terimakasih untuk dukungan moril yang diberikan--. Terimakasih juga untuk pembimbing kami Bapak **Dr. Edmon Makarim, S.Kom, S.H** yang telah membantu membangun konstruksi berfikir hukum secara sistematis dan terarah—Gelar guru besar pertama bidang *Cyber Law* pantas untuk disematkan atas ilmu dan dedikasinya---, serta tidak lupa terima kasih banyak kepada seluruh

Dewan Penguji. Terimakasih untuk kritik dan masukan terbaik dalam penyempurnaan tesis ini.

Penulis menyampaikan terima kasih pula kepada jajaran akademis Fakultas Hukum Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Bapak Dekan, Kepala Program, dan seluruh pengajar serta staf administrasi.

Terimakasih juga untuk seluruh sahabatku sesama alumni Magister Hukum Universitas Indonesia angkatan 2007 (Pak Teguh Heru Martono, Mbak Yanti, Viktor, Ingga, Novita, Mbak Mela, Mbak Herlyn, Lasma, Tessa dan kawan-kawan lainnya), alumni Fakultas Hukum Universitas Diponegoro angkatan 2000, pejabat dan rekan kerja di Inspektorat Jenderal Kementerian Kominfo (khususnya Bapak Inspektur Jenderal Agung Wijajadi, Bapak Inspektur III Sofyan Tanjung, rekan kerja; M. Arief, Luat Sihombing, Deny Kurniawan, Misbahuddin, Randi, Tina, Meris, Adis, Bapak Moestamin, Bapak Endang Lukman, dan teman-teman lain yang belum tersebut).

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya ilmiah ini masih jauh dari kata 'sempurna' dan banyak kekurangannya. Hal itu tak lain dikarenakan terbatasnya ilmu yang dimiliki dan dipahami penulis. Untuk itu kritik dan saran membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan penulisan-penulisan berikutnya.

Akhirnya, penulis berharap semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Jakarta, Juli 2010

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Teguh Arifiyadi
NPM : 0706176252
Program Studi : Ilmu Hukum / Hukum Ekonomi
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**ANALISIS HUKUM PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK
(*ELECTRONIC PROCUREMENT*) PADA INSTANSI PEMERINTAH**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : Juli 2010

Yang Menyatakan

Teguh Arifiyadi

ABSTRAKSI

Tesis ini membahas bagaimana revolusi teknologi dan informasi (TI) dan reformasi keuangan negara telah mempengaruhi terjadinya perubahan manajemen penyelenggaraan negara dan pemerintahan dalam menyelenggarakan pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah dari yang sistem yang manual menjadi sistem elektronik.

E-procurement pemerintah berkembang dari tahapan konvensional menjadi semi *e-procurement*, dan berkembang ke arah penerapan *e-procurement* secara utuh. Tesis ini menggambarkan perbedaan tiap tahapan dari implementasi *e-procurement* instansi pemerintah di Indonesia.

E-procurement dianggap sebagai salah satu isu penting pada pembahasan badan-badan perdagangan internasional dalam menyusun kebijakan ekonomi. Pemberlakuan prinsip-prinsip umum (*general principles*) telah mempengaruhi penyusunan kebijakan pengadaan pada beberapa negara di dunia.

Indonesia belum secara implisit mengatur pokok-pokok kebijakan *e-procurement* pemerintah. Pengembangan *e-procurement* saat ini masih bersifat parsial dan belum didukung kebijakan yang berlaku secara nasional sesuai dengan standarisasi yang diharapkan.

Penyelenggaraan sistem elektronik pengadaan (*e-procurement*) pemerintah sendiri berimplikasi pada adanya tanggung jawab hukum penyelenggara, baik dalam kedudukannya sebagai badan hukum publik maupun kedudukannya saat memasuki area hukum privat dalam hubungan kontraktualisasi transaksi elektronik. Tanggung jawab penyelenggara dalam lingkup hukum publik berkorelasi dengan kewajiban penyelenggara untuk mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada area publik seperti undang-undang keuangan negara, undang-undang pelayanan publik, maupun undang-undang kearsipan. Sedangkan dalam lingkup privat, pemerintah harus mematuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam hukum perdata.

Kata Kunci : *procurement*, pengadaan, *electronic*, sistem elektronik, tanggung jawab pemerintah, *e-commerce*

D A F T A R I S I

		Hlm.
	HALAMAN JUDUL.....	i
	LEMBAR PENGESAHAN.	ii
	KATA PENGANTAR.....	iii
	LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	iv
	ABSTRAKSI.....	v
	DAFTAR ISI.....	vi
	DAFTAR GAMBAR.....	vii
	DAFTAR TABEL.....	viii
BAB 1	PENDAHULUAN.....	1
	1.1 Latar Belakang	1
	2.1 Pokok Permasalahan.....	5
	3.1 Tujuan Penulisan.....	5
	4.1 Manfaat Penulisan.....	6
	5.1 Kerangka Teori Dan Kerangka Konseptual.....	6
	5.1.1 Kerangka Teori.....	6
	5.1.2 Kerangka Konseptual.....	9
	6.1 Metode Penelitian.....	13
	7.1 Sistematika Penulisan.....	16
BAB 2	KONSEP DASAR PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.....	18
	2.1 Konsep Pengelolaan Keuangan Negara.....	18
	2.1.1 Definisi Keuangan Negara.....	19
	2.1.2 Anggaran dan Pelaksanaan Belanja Negara.....	21
	2.2 Konsep Dasar Pengadaan Pemerintah.....	22
	2.2.1 Beberapa Ketentuan Internasional Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.....	22
	2.2.1.1 Agreement on Government Procurement (GPA 1994).....	23
	2.2.1.2 Model Hukum UNCITRAL.....	27
	2.2.1.3 Pedoman Pengadaan Bank Dunia.....	30
	2.2.1.4 Directive Uni Eropa.....	32
	2.2.2 Konsep Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Indonesia.....	34
BAB 3	KONSEP PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (<i>E- PROCUREMENT</i>) INSTANSI PEMERINTAH.....	41
	3.1. Sistem Pengadaan Secara Elektronik (<i>E-Procurement</i>).....	41

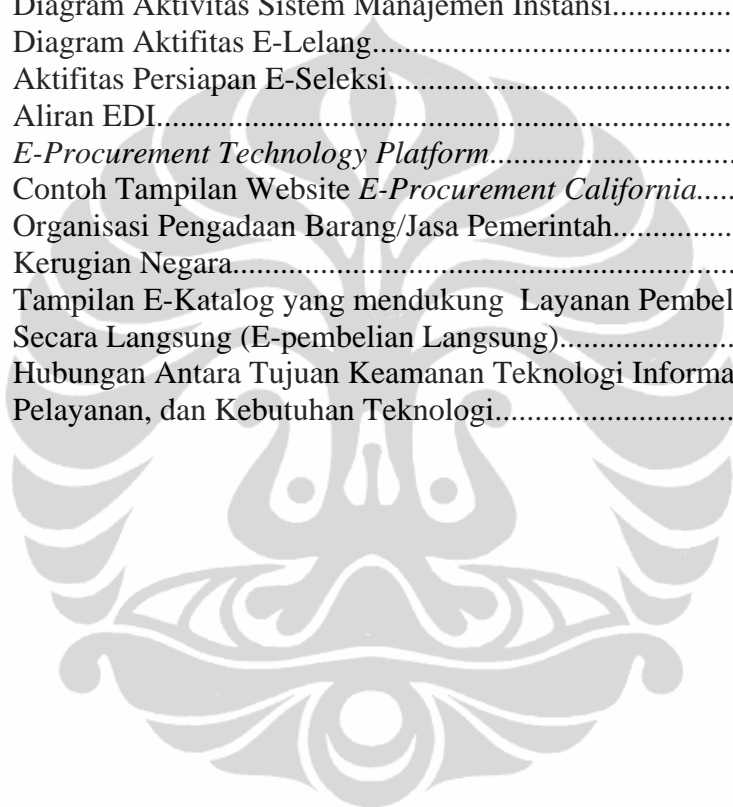
3.1.1	Definisi <i>E-Procurement</i>	41
3.1.2	Sejarah Implementasi <i>E-Procurement</i> di Indonesia.....	44
3.1.3	Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemerintah.....	56
3.1.4	Teknis Penggunaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik.....	50
3.1.4.1	Sistem Manajemen <i>E-Procurement</i> Penyedia Barang/Jasa.....	52
3.1.4.2	Sistem Manajemen <i>E-Procurement</i> Instansi pemerintah.....	55
3.1.5	Jenis-Jenis Layanan <i>E-Procurement</i> Pemerintah.....	57
3.1.5.1	E-Lelang	57
3.1.5.2	E-Seleksi.....	59
3.1.6	Pertukaran Data secara Elektronik.....	60
3.1.7	<i>Electronic Audit</i> dalam <i>E-Procurement</i>	66
3.1.7.1	Bukti Audit.....	70
3.2	Catatan Ringkas <i>E-Procurement</i> Pada Beberapa Negara.....	72
3.2.1	Malaysia.....	72
3.2.2	Perancis.....	74
3.2.3	Jepang.....	75
3.2.4	Philipina.....	76
3.2.5	Amerika.....	77
BAB 4	TANGGUNG JAWAB HUKUM PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK PENGADAAN PEMERINTAH TERKAIT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA.....	80
4.1	Kedudukan Pemerintah dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik Pengadaan.....	80
4.1.1	Perbuatan Melawan Hukum Pemerintah Dalam Hukum Administrasi Negara dan Hukum Perdata.....	82
4.2	Tanggung Jawab Hukum Keuangan Negara dalam <i>E- Procurement</i>	84
4.2.1	Para Pihak dalam Manajemen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.....	85
4.2.2	Penyimpangan Keuangan Negara.....	87
4.3	Tanggung Jawab Hukum Penyelenggaraan Layanan Publik.....	93
4.4	Tanggung Jawab Hukum Penyelenggaraan Kearsipan.....	97
4.4.1	Penyelenggaraan Kearsipan dalam <i>E-Procurement</i>	99
4.5	Tanggung Jawab Hukum Terkait Penyelenggaraan Sistem Elektronik.....	103
4.5.1	Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dalam Lingkup Publik.....	104
4.5.2	Infrastruktur Keamanan Transaksi Elektronik.....	112

BAB 5	KESIMPULAN DAN SARAN	119
5.1	Kesimpulan.....	119
5.2	Saran.....	121
	DAFTAR PUSTAKA.....	ix
	RIWAYAT HIDUP.....	x



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Tampilan Aplikasi <i>E-Procurement</i> Milik Kementerian Kominfo.....	46
Gambar 3.2	Hubungan Para Pihak dalam Pengadaan Barang/Jasa melalui <i>E-Procurement</i>	50
Gambar 3.3	Sistem Manajemen Penyedia Barang/Jasa.....	54
Gambar 3.4	Diagram Aktivitas Sistem Manajemen Instansi.....	56
Gambar 3.5	Diagram Aktifitas E-Lelang.....	58
Gambar 3.6	Aktifitas Persiapan E-Seleksi.....	60
Gambar 3.7	Aliran EDI.....	64
Gambar 3.8	<i>E-Procurement Technology Platform</i>	65
Gambar 3.9	Contoh Tampilan Website <i>E-Procurement California</i>	79
Gambar 4.1	Organisasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.....	86
Gambar 4.2	Kerugian Negara.....	90
Gambar 4.3	Tampilan E-Katalog yang mendukung Layanan Pembelian Secara Langsung (E-pembelian Langsung).....	105
Gambar 4.4	Hubungan Antara Tujuan Keamanan Teknologi Informasi, Pelayanan, dan Kebutuhan Teknologi.....	114



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Anggota GPA.....	26
Tabel 3.1	Indikator Pemanfaatan <i>E-Procurement</i> pada Instansi Pemerintah.....	50
Tabel 3.2	Perbedaan Tahapan Dalam Pengadaan Barang/Jasa pada Instansi Pemerintah.....	51
Tabel 3.3	Perbedaan Audit Pengadaan Konvensional dan <i>E-Audit</i>	70

